

BAB V. BUDAYA *BLUSUKAN* DAN *FAMILISME* DALAM DEMOKRASI LOKAL (STUDI PEMILIHAN WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2020)

Setiajid¹ dan Martien Herna Susanti²

^{1,2}Program Studi Ilmu Politik FIS, Universitas Negeri Semarang
setiajid@mail.unnes.ac.id, martien@mail.unnes.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.1529/kp.v1i3.52>

ABSTRAK

Penelitian ini mendeskripsikan budaya *blusukan* sebagai strategi yang dilakukan pasangan Gibran-Teguh yang berhasil memenangkan Pemilihan Walikota (Pilwakot) Surakarta tahun 2020. *Blusukan* merupakan simbol tradisi identitas budaya Jawa yang diartikan suatu perilaku keluar masuk suatu tempat, sekedar mengenali kondisi secara alamiah, hingga sebutan bagi seseorang yang melakukan perjalanan ke tempat-tempat dimana masalah belum terungkap. Semenjak tradisi ini digunakan oleh para kandidat dalam kampanye, maka *blusukan* lebih dimaknai secara politis sebagai salah satu strategi kampanye untuk memperkenalkan diri kepada publik, menyampaikan visi dan misi, serta mempengaruhi pilihan masyarakat. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di Kota Surakarta. Fokus pembahasan mengaitkan *blusukan* dan *familisme* pada Pilwakot Surakarta tahun 2020. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi serta diuji validitasnya dengan menggunakan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan, *blusukan* yang dilakukan pasangan Gibran-Teguh mengadopsi strategi Jokowi pada konstestasi Pilkada Surakarta dan Pilpres. Inovasi baru berupa *blusukan* digital terbukti menjadi strategi kampanye efektif bagi masyarakat Surakarta yang masih kental dengan pola komunikasi interpersonal selain faktor *familisme*. Menguatnya dinasti politik mengindikasikan perlunya pembenahan proses rekrutmen politik

sekaligus partisipasi publik dalam mengawal Pilkada agar berjalan jujur, adil, dan berintegritas.

Kata Kunci: *Blusukan*, *Familisme*, Demokrasi lokal, Pemilihan Walikota

PENDAHULUAN

Blusukan merupakan simbol tradisi identitas budaya Jawa yang diartikan suatu perilaku keluar masuk suatu tempat, sekedar mengenali kondisi secara alamiah, hingga sebutan bagi seseorang yang melakukan perjalanan ke tempat-tempat dimana masalah belum terungkap. Semenjak tradisi ini digunakan oleh para kandidat dalam kegiatan kampanye, maka *blusukan* lebih dimaknai secara politis yaitu sebagai salah satu strategi kampanye kandidat untuk memperkenalkan diri kepada publik, menyampaikan visi dan misi, serta mempengaruhi pilihan masyarakat. Salah satu kandidat yang sukses menggunakan metode kampanye ini adalah Joko Widodo (Jokowi) yang berhasil memenangi Pilkada di Solo sebanyak dua kali (2005 dan 2010), DKI satu kali (2012), serta Pemilu Presiden (Pilpres) 2014. Fenomena *blusukan* yang berhasil memenangkan konstestasi ini, pada akhirnya mengilhami kandidat lain untuk menggunakan strategi yang sama dalam memenangkan suara Pemilu maupun Pilkada.

Dikaitkan dengan komunikasi politik, maka *blusukan* termasuk dalam pola komunikasi interpersonal yang digunakan sebagai strategi kampanye pasangan Gibran-Teguh pada Pilwakot 2020. *Blusukan* dalam Pilwakot tahun 2020 ini menggunakan metode yang tidak persis sama dengan *blusukan* sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari inovasi yang digunakan oleh pasangan tersebut dalam melaksanakan kampanye di tengah-tengah pandemi covid-19. Kemampuan dalam berinovasi menggunakan *blusukan* digital berhasil memperkenalkan diri secara luas kepada publik, menyampaikan visi dan misi, juga sekaligus mampu membangun komunikasi interpersonal yang efektif dengan masyarakat. Alhasil strategi ini berhasil memenangkan pasangan calon Gibran-Teguh pada Pilwakot Surakarta tahun 2020. Kemenangan Gibran menarik untuk diteliti lebih lanjut, karena

selain merupakan kandidat yang relatif masih baru terjun ke dunia politik, juga dikaitkan hubungan Gibran sebagai anak atau kerabat dari Jokowi yang sebelumnya menjadi walikota Solo dan saat ini menjabat sebagai presiden Republik Indonesia. Hubungan *familisme* yang masih kental pada masyarakat Kota Surakarta juga dapat dianalisis lebih lanjut untuk melihat kaitan hubungan *familisme* dengan kemenangan pasangan Gibran-Teguh ini.

Pilwaktot Surakarta tahun 2020 diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon yaitu Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakosa yang diusung PDIP, PSI, Gerindra, PAN, Golkar, dan PKB dan Bagyo Wahyono-Suparjo Fransiskus Xaverius yang berasal dari calon perseorangan (Surakarta, 2020). Munculnya satu pasangan calon yang diusung oleh partai politik menunjukkan macetnya kaderisasi partai politik dalam menjaring calon kepala daerah. Sebagaimana diketahui calon perseorangan menghadapi tantangan yang berat untuk dapat berkontestasi. Sikap pragmatism partai politik juga secara tidak langsung menyuburkan lahirnya dinasti politik dengan mendorong kalangan keluarga petahana menjadi pejabat politik. Mosca menegaskan, setiap kelas menampilkan kecenderungan untuk berlangsung turun-temurun, bahkan ketika posisi politik terbuka luas, maka kedudukan keluarga penguasa akan tetap mendapatkan berbagai keuntungan (Dal Bó et al., 2009). Inilah yang kemudian menjadi cikal bakal dinasti politik sebagai bentuk reproduksi kekuasaan tradisional, karena mengandalkan darah dan keturunan.

Familisme tidak terlepas dari fenomena dinasti politik sebagai proses mengarahkan regenerasi kekuasaan golongan tertentu (elit). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, bertujuan membatasi dinasti politik dengan menggunakan pendekatan larangan konflik kepentingan. Pasal 7 poin q, menyebutkan tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Selanjutnya dalam penjelasan pasal 7 poin q ini disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan “tidak memiliki konflik kepentingan” adalah antara lain, tidak memiliki

ikatan perkawinan atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan. Regulasi tersebut batal demi hukum setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 34/PUU-XIII/2015 yang menegaskan pernyataan “konflik kepentingan dengan petahana” dalam UU ini hanya menggunakan pertimbangan yang bersifat politis dan asuntif seolah-olah setiap calon yang mempunyai hubungan darah maupun perkawinan dengan petahana dipastikan akan membangun dinasti politik yang mencederai demokrasi.

Kemenangan Gibran Rakabuming Raka di Kota Surakarta dan Bobby Afif Nasution menantu Jokowi di Kota Medan menjadi sorotan banyak kalangan. Bahkan media asingpun juga memberitakan anak dan menantu Presiden Joko Widodo yang mencalonkan diri dalam kontestasi pemilihan Pilkada tahun 2020 tersebut. Salah satu judul artikel media Inggris *The Economist* bertajuk “*Indonesian politics is becoming a family affair*”, mengunggah pernyataan Jokowi yang pernah bersumpah bahwa para politisi baru di lingkaran keluarganya tidak akan bergantung padanya. Pernyataan itu sempat dimuat dalam buku autobiografi Jokowi yang diterbitkan pada 2018 lalu (Ans/evn et al., 2020). Munculnya kandidat yang memiliki hubungan kekerabatan atau dinasti politik ini menegaskan kontestan yang berafiliasi dengan dinasti politik terkait preferensi kekuasaan dibangun dari segi penerimaan maupun pembangunan rezim. Kemenangan ini dipersepsikan dimulainya babak baru Dinasti politik Jokowi yang pada akhirnya menambah klub dinasti politik lain dalam perebutan kekuasaan dan sumber daya di daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam artikel ini adalah budaya *blusukan* dan *familisme* dalam demokrasi lokal (studi pemilihan Walikota Surakarta tahun 2020).

Artikel ini mendeskripsikan fenomena di atas, menggunakan metode kualitatif. Metode ini digunakan untuk meneliti objek yang alamiah di mana peneliti merupakan instrumen kunci. Menurut Bodgan dan Taylor sebagaimana dikutip oleh Lexy J. Moleong mendeskripsikan metodologi kualitatif

sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data dan perilaku yang diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (Moleong, 2018). Data kualitatif untuk artikel ini dikumpulkan melalui dokumentasi berupa artikel jurnal, media pemberitaan yang kredibel, hasil pemilu dari KPU dan sumber kepustakaan lainnya serta utamanya melalui wawancara.

DINASTI POLITIK DAN *FAMILISME* SEBAGAI KERANGKA PEMIKIRAN

1. Dinasti Politik

Dinamika pemilihan kepala daerah di Indonesia terus berkembang hingga dilaksanakannya pemilihan kepala daerah langsung. Pasca reformasi yang diharapkan menjadi tonggak transisi demokrasi di Indonesia masih diwarnai dengan upaya beberapa pihak, khususnya petahana untuk menempatkan kerabatnya di posisi strategis di pemerintahan. Fenomena ini dibuktikan dengan kuatnya dinasti politik di beberapa wilayah di Indonesia. Sebagai contoh Provinsi Banten yang hingga saat ini memiliki dinasti politik yang masih kuat. Banten menjadi salah satu contoh dinasti politik yang mengakar dengan keluarga besar Ratu Atut Chosiyah yang menguasai posisi strategis, mulai dari legislatif sampai pada eksekutif. Dinasti politik Banten dibentuk oleh ayah Ratu Atut Chosiyah, yaitu Chasan Sohib dan semakin menggurita sejak Ratu Atut menjadi gubernur Banten pada 2007-2017 dan keluarga besarnya menduduki berbagai jabatan publik. Hikmat Tomet (suami), menjadi anggota DPR (2009-2014), Andika Hazrumy (anak) menjadi anggota DPD (2009-2014) dan DPR (2014-2019), Ade Rossi Khaerunisa (menantu) menjadi anggota DPRD Kota Serang (2009-2014), Ratu Tatu Chasanah (adik) menjadi anggota DPRD Banten (2010-2015), Th. Khaerul Jaman (adik tiri) menjadi Wakil Wali Kota Serang (2008-2013), Ratna Komalasari (ibu tiri) menjadi anggota DPRD Kota Serang (2009-2014), Heryani (ibu tiri) menjadi Wakil Bupati Pandeglang (2010-2015), dan Airin Rachmi Diany (adik ipar) menjadi Wali Kota Tangerang Selatan (2011-2016). Dengan diberlakukannya aturan tentang pilkada serentak,

Airin Rachmi Diany yang merupakan wali kota Tangerang Selatan periode 2011-2016 harus mengakhiri masa jabatannya lebih cepat pada 2015 (Sukri, 2020) .

Fenomena kemenangan dinasti politik pada Pilkada di atas, tidak berlaku sama di wilayah lain. Sebagai contoh Pilkada Kabupaten Bandung tahun 2020, dimana pasangan Kurnia Agustina dan Usman Sayogi yang diusung partai Golkar dan Gerindra yang tidak lain adalah istri dari Dadang Naser sekaligus anak kandung dari Bupati Bandung sebelumnya hanya mampu menempati urutan kedua dan dikalahnya oleh pasangan Dadang Supriatna-Sahrul Gunawan yang diusung PKB, NasDem, Demokrat, dan PKS. Dadang Naser adalah Bupati Bandung yang berkuasa selama 10 tahun, di mana tahun 2020 merupakan periode terakhir. H. Obar Sobarna adalah Bupati Bandung yang juga menjabat selama dua periode sebelum dilanjutkan oleh sang menantu Dadang Naser (Hyg/fra et al., 2021) .

Buehler (2013) mencatat, bahwa banyak keluarga dinasti politik yang berhasil berkuasa di dua siklus pemilihan eksekutif dan bahkan berusaha memperluas basis mereka untuk bergabung dengan legislatif di berbagai tingkat pemerintahan. Hal ini tidak lain bertujuan untuk mendominasi pos-pos pemerintah eksekutif. Buehler menyimpulkan bahwa kekuatan konsolidasi yang cepat dari dinasti politik adalah salah satu tanda runtuhnya integritas demokrasi lokal sekaligus tonggak kemenangan klientelistik, jaringan informal atas partai politik, kekalahan dorongan reformasi dengan korupsi dan perilaku predator. Kesimpulan ini diperkuat fakta, bahwa pemimpin lokal yang berasal dari dinasti politik terlibat dalam perilaku predator dan koruptif pada politik lokal di Indonesia (Aspinall & Uhaib, 2016).

2. *Familisme*

Familisme merupakan hipotesis atas pengaruh keluarga dalam membentuk nilai, moral, maupun orientasi kekuasaan sehingga terjadi model monarki kekuasaan. Fokus pembahasan artikel ini adalah pengaruh familisme yang berkembang menjadi budaya politik sebagai basis suksesi kekuasaan. Dalam hal ini, dinasti politik merupakan bentuk kolektif dari patronase elit dalam wujud

kolektif yang didasarkan pada hubungan keluarga, etnisitas, maupun hubungan darah lainnya yang intinya memunculkan monarki dalam demokrasi di aras lokal (Sisca, 2020).

Garzon menyebutkan bahwa *familisme* adalah budaya politik dengan ketergantungan yang terlalu besar terhadap ikatan keluarga yang kemudian melahirkan kebiasaan untuk menempatkan keluarga atau yang memiliki ikatan kekerabatan pada kedudukan yang tinggi. Familisme dapat diartikan sebagai dorongan psikologis seseorang untuk bisa berkarir di dua ranah, yaitu di ranah publik sebagai birokrat dan ranah privat selaku korporat swasta. Djati menjelaskan terdapat empat tipologi rezim dinasti politik di Indonesia, yaitu: *Pertama*, familisme yang berbasis *populism dynasties*, yaitu dinasti politik yang dibangun dengan alasan sebagai upaya melanjutkan program pembangunan kepala daerah sebelumnya atau berdasarkan romantisme kepala daerah. *Kedua*, *octopussy dynasties*, yaitu dinasti politik yang berbasis pada jaringan kuasa menggurita, karena jaringannya yang luas. Dinasti politik ini dibangun berdasarkan jejaring kuasa mulai dari koalisi klan politik, monopoli sosial, ekonomi, kekerasan dan sebagainya. Dinasti politik ini dirancang oleh para kerabat untuk terjun ke dunia politik. *Ketiga*, *tribalism dynasties*, yaitu klan politik yang berbasiskan pada etnisitas dan reproduksi ritus budaya kerajaan. *Keempat*, *feudalisme dynasties* atau kuasa *gono-gini*, yaitu dinasti politik yang dibangun berdasarkan patrimonialisme, figurisasi, elitisme dan *aji mumpung*. Dinasti politik di Banten dapat dijadikan contoh tipologi familisme jenis ini (Djati, 2013).

Gaezon (2002) menjelaskan, bahwa konsep familisme dan dinasti politik merupakan dua hal yang saling berkaitan, karena dinasti politik berhubungan dengan *familisme* berdasarkan hubungan darah atau perkawinan. Menurutnya dinasti politik yang dibangun atas dasar *familisme* ini meliputi tiga bentuk, yaitu: *Pertama*, model arisan, dimana satu daerah dipimpin oleh satu keluarga secara terus menerus. *Kedua*, model *cross-chamber* atau silang, yaitu kekuasaan bercabang dan dibagi menjadi posisi-posisi strategis di suatu daerah. *Ketiga*, *cross-regional* yaitu posisi penting dikendalikan oleh satu keluarga dengan penempatan wilayah yang

berbeda (Riyansah, 2021).

Kajian budaya politik atas dinasti politik sudah dilakukan dari berbagai sudut pandang. *Pertama*, neopatrimonialisme oleh Haris (Djati, 2013) yang memandang dinasti politik dipandang sebagai eksekusi dari otonomi daerah yang menjadikan demokrasi terbajak (*hijacked democracy*) oleh sirkulasi hubungan inti genealogis, berdasarkan relasi kekeluargaan maupun di luar garis genealogis yang memiliki kepentingan melanggengkan kekuasaan. *Kedua*, dinasti politik sebagai bentuk politik keluarga (*political clan*) digunakan (Kreuzer, 2005), bahwa dinasti politik muncul sebagai eksekusi dari warisan feodalisme yang masih berpengaruh kuat di masyarakat tidak hanya penguasaan sumber daya ekonomi saja, melainkan terbentuknya jejaring loyalitas dalam masyarakat yang melibatkan tokoh informal. *Ketiga*, kajian dinasti politik sebagai bentuk praktik politik predator. Pemahaman politik predator merupakan pengembangan tesis Migdal (1988) mengenai *local strongmen* maupun Sidel (2005) tentang *local bossism*. Studi pendekatan ini dilakukan oleh Asako (2010) dan McCoy (1994) yang menganalisis tumbuhnya dinasti politik justru terjadi karena adanya kolusi bisnis-politik di tingkat lokal (Djati, 2013).

Dinasti politik menurut Park (Hee Park, 2004) juga disebabkan oleh faktor familisme yang meliputi 3 (tiga) model yaitu: (1) Dinasti politik yang didasarkan secara murni pada hubungan darah langsung dalam keluarga (*consanguinity*), dan hubungan perkawinan (*marriage*) dengan klan lainnya; (2) Quasi-familisme. Model ini didasarkan pada sikap afeksi dan solidaritas dari anggota keluarga dalam struktur kekuasaan; dan (3) *Familisme*. Model dinasti politik ini didasarkan pada pemenuhan aspek fungsionalisme dibandingkan garis keturunan maupun ikatan darah.

Tidak semua keluarga pejabat politik yang berhasil meraih kekuasaan dapat dikategorikan sebagai dinasti politik. Hal ini dikaitkan dengan pendapat Hess yang mendefinisikan, bahwa dinasti politik harus memiliki setidaknya empat anggota, dalam satu keluarga yang menduduki jabatan politik (Kurtz, 1989). Keluarga Yasin Limpo di Sulawesi Selatan dan Ratu Atut di Banten

menjadi contoh yang relevan dengan pendapat Hess di atas, karena terdapat delapan anggota keluarga yang menduduki jabatan politik.

Dilihat dari jenis suksesi pemerintahan di Indonesia, maka dapat dibedakan menjadi dinasti politik *by design* dan *by accident*. *By design* jika jejaring familisme dalam pemerintahan sudah terbentuk lama dan memiliki relasi yang kuat, sehingga kerabat yang ingin memasuki jabatan pemerintahan maupun politik sudah didesain sejak awal untuk menempati jabatan tersebut. *By accident* jika suksesi pemerintahan tiba-tiba mencalonkan kerabat untuk menggantikannya demi menjaga kekuasaan “informal” terhadap penggantinya (Djati, 2013).

Tantri dan Thota (2015) menjelaskan dominasi hasil penelitian tentang dinasti politik menunjukkan dampak buruk baik sosio-ekonomi dan politik, seperti klientisme, kemiskinan tinggi, pertumbuhan ekonomi rendah, kinerja parlemen yang buruk, hingga kualitas sumber daya manusia yang rendah. Mereka juga mempelajari dampak persistensi dinasti terhadap kinerja institusi demokrasi di India. Dengan menggunakan desain regresi diskontinuitas, riset ini menemukan anggota parlemen yang berafiliasi dengan dinasti politik memiliki kinerja buruk dibandingkan dengan anggota parlemen nondinasti (Ahmad, 2019). Selanjutnya penelitian dinasti politik dalam kekuasaan legislatif menunjukkan, bahwa legislator dinasti politik menikmati keuntungan elektoral, mengambil lebih banyak sumber daya distrik, dan memiliki efek merugikan bagi kinerja ekonomi di masing-masing distrik (Asako et al., 2015).

BLUSUKAN DALAM PILWAKOT SURAKARTA TAHUN 2020

1. Kajian tentang Budaya *Blusukan*

Blusukan berasal dari bahasa Jawa secara etimologis, dari kata dasar *blusuk* (artinya pintu masuk) dan sufiks-*an* (imbuhan kata kerja) yang artinya memasuki suatu tempat untuk mengetahui sesuatu. Istilah *blusukan* mengacu pada perilaku keluar masuk suatu tempat, sekedar mengenali kondisi suatu tempat secara alamiah atau budaya. *Blusukan* adalah sebutan bagi seseorang yang

melakukan perjalanan ke tempat-tempat masalah yang belum terungkap. Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mengetahui kondisi nyata di lapangan. Istilah *blusukan* digagas oleh Raja Surakarta yaitu Raja Paku Buwono V. *Blusukan* merupakan bagian identitas etnis Masyarakat Jawa sekaligus sebagai ciri khas simbol budaya, bahasa, organisasi dan ideologis yang harus ditaati oleh masyarakat, khususnya etnis Jawa agar dapat saling berinteraksi (Gama et al., 2019). Gibran-Teguh sebagai masyarakat Jawa memanfaatkannya sebagai strategi kampanye untuk mendapat simpati masyarakat.

Secara substansial, makna *blusukan* yang dilakukan oleh kandidat selama kampanye Pilkada saat ini telah bergeser dari tujuan *blusukan* yang digagas oleh Raja Paku Buwono V dengan maksud mengetahui kondisi riil masyarakat. *Blusukan* menjelang Pilkada bertujuan untuk membangun kepercayaan dan kedekatan kepada masyarakat yang pada akhirnya akan mendapatkan simpati dari calon pemilih. Melalui kegiatan ini kandidat dapat melakukan komunikasi interpersonal dengan masyarakat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik. Melalui komunikasi interpersonal tersebut masyarakat dapat melihat secara langsung profil kandidat seperti bentuk tubuh, pakaian, gaya bicara, bahasa yang digunakan, atribut yang digunakan dan seterusnya.

Blusukan sebagai bentuk komunikasi dimaksudkan untuk menjalin komunikasi dua arah yang terbuka melalui diskusi secara lebih dekat atau dalam istilah Barat disebut dengan *managing by walking around*. Dikaitkan dengan perspektif lokal, masyarakat Jawa mengenal konsep *blusukan* sebagai bagian dari komunikasi langsung atau *face to face* antara kandidat dengan pendukungnya. Kedekatan personal yang dibangun ini melahirkan kedekatan personal secara psikologi atau dalam istilah masyarakat Jawa dikenal dengan *sambung roso* atau sambung rasa dari hati ke hati sehingga menimbulkan ikatan emosi (empati) yang kuat sebagai perwujudan prinsip kebersamaan yang tidak membedakan status atau *manunggaling kawula lan Gusti*.

Ikatan emosi yang dibangun melalui komunikasi interpersonal terbukti mampu mendekatkan jarak psikologi, karena adanya prinsip kebersamaan tanpa membedakan status antara komunikan dan komunikator. Pesan yang disampaikan mengalir melalui metode *gethok tular* atau *word of mouth*. Mengutip dari model pemasaran dalam ekonomi, maka *word of mouth* mempunyai kelebihan yaitu proses menyebar luas secara lebih cepat dan terpercaya. Kunjungan langsung kandidat ke masyarakat atau konstituennya melalui *blusukan* dapat dimanfaatkan untuk mengecek secara langsung aspirasi dan kepentingan konstituennya sebagai landasan menyusun platform materi kampanye sekaligus meningkatkan kepercayaan publik. Sehingga tidak berlebihan, jika *blusukan* menjadi sarana alternatif kritik terhadap model kepemimpinan dominasi politik saat ini yang dipersepsikan lambat, birokratis, dan sangat berjarak dengan rakyat.

Strategi *blusukan* digital dipilih pasangan Gubran-Teguh dengan memanfaatkan *virtual box* sebagai sarana kampanye online. *Virtual box* yang dimaksud berupa layar monitor berukuran 49 inci dilengkapi kamera jenis *circuit TV* menggunakan jaringan internet dan mikrofon. *Virtual box* ini dibawa berkeliling oleh tim sukses ke rumah-rumah penduduk untuk menyapa dan melakukan interaksi dengan warga. Dalam kesempatan tersebut, warga dapat menyampaikan keluhannya secara langsung, tanpa menciptakan kerumunan sebagaimana slogan Gibran “*Pemilune slamet, wargane iso ngeliwet*”, artinya Pemilunya selamat, warganya bisa makan”. Dengan demikian melalui *virtual box* tersebut interaksi dapat terjadi secara dua arah.

Antusiasme masyarakat atas model kampanye ini, tidak terlepas dari budaya Jawa yang diakomodasi oleh strategi ini. Dalam prinsip Jawa, dikenal dengan istilah *nguwongke* (memanusiakan manusia). Pilihan strategi ini tidak terlepas dari pemanfaatan identitas budaya lokal untuk menarik perhatian masyarakat. Identifikasi diri sebagai bagian dari etnis lokal sangat penting dalam konteks politik lokal agar dapat dapat diterima masyarakat luas yang selanjutnya mengarahkan pilihan

masyarakat kepada kandidat. Simbol identitas berupa pakaian, bahasa, dan perilaku yang sama menjadi hal yang sangat mendukung strategi ini. Hal ini dimaksudkan membangkitkan emosi pemilih untuk mendukung aktor politik. Seperti yang dilakukan oleh Gibran dalam blusukan di tahun 2020, mengenakan pakaian khas daerah yaitu baju lurik pada saat berkampanye untuk menarik simpati masyarakat. Pakaian ini merupakan perwujudan fisik dari ide, nilai, dan norma yang mengatur dan memberi arah kepada masyarakat dalam budaya tertentu. Busana dan pakaian merupakan salah satu bentuk komunikasi nonverbal, dimana tidak menggunakan kata-kata lisan maupun tulisan. Lebih lanjut, pakaian yang dikenakan menjadi *branding campaign* dalam pemilihan kepala daerah yang mudah dilihat dan dikenali sebagai pembeda dibandingkan kandidat lainnya.

2. Pemilihan Kepala daerah dalam Konteks Demokrasi Lokal

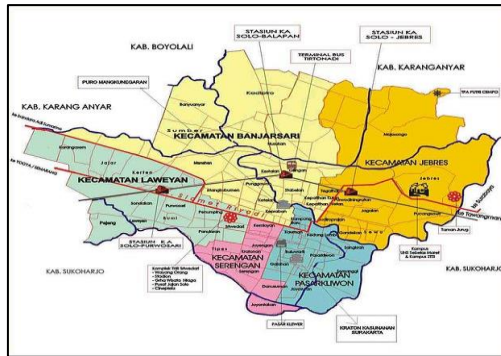
Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah dengan format pemilihan kepala daerah langsung idealnya memberikan legitimasi yang kuat bagi kandidat pemenang Pilkada. Selain itu pemilihan langsung tersebut untuk memastikan dapat memperkuat akuntabilitas dan responsibilitas kepala daerah terpilih kepada rakyat sekaligus mendorong partisipasi masyarakat di daerah dalam rangka memperkuat demokratisasi di tingkat lokal. Dalam praktiknya, muncul hubungan yang berbanding lurus antara desentralisasi dan demokrasi di tingkat lokal yang ditandai oleh berkembangnya orang-orang kuat di tingkat lokal (*local bossisme*). Penelitian John T. Sidel mengungkapkan bahwa kecenderungan tersebut terkait dengan perkembangan politik saat yang ditunjukkan adanya peran elit lokal sebagai *predatory broker* politik yang memiliki kontrol monopoli. *Bossisme* lokal adalah aktor negara formal yang bergabung dan membentuk jaringan yang mengakar sampai ke tingkat regional terendah dan berusaha memonopoli kekuasaannya di tingkat lokal (Romadhan et al., 2019).

Kondisi di atas pada akhirnya melahirkan raja-raja kecil, yang menguasai wilayah, baik dalam hal penguasaan politik melalui parlemen di tingkat lokal, partai politik, maupun kekuasaan

eksekutif dan yudikatif lokal, akses sumber ekonomi melalui aparat militer dan kepolisian maupun organisasi para militer. Fenomena orang kuat lokal ini makin berkembang dan menguat seiring perkembangan politik elektoral. Akibat fenomena ini, maka perkembangan demokrasi melalui Pilkada hanya bersifat prosedural.

Terwujudnya demokrasi di daerah merupakan prasyarat terwujudnya demokrasi di tingkat nasional (Ahmad, 2019). Perbaikan kualitas demokrasi di daerah akan mendorong kualitas demokrasi di tingkat nasional. Oleh karena itu persoalan sengketa Pilkada, kasus korupsi, dan *abuse of power* lainnya perlu segera diselesaikan.

Pada Pilwakot Surakarta tahun 2020 mayoritas partai politik atau sebanyak 6 (enam) partai setara dengan jumlah kursi DPRD sebanyak 40 kursi mengusung pasangan Gibran-Teguh, yaitu PDIP, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), Golkar, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Satu-satunya partai yang tidak mendukung adalah PKS yang memiliki 5 (lima) kursi. Sesuai ketentuan, maka PKS tidak dapat mengusung calonnya sendiri, karena terhalang ketentuan pasal 40 ayat (1) UU Pilkada menyebutkan, "Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan. Jika kursi DPRD Kota Surakarta adalah 45 kursi, maka partai politik yang dapat mengusung calon adalah sebanyak 9 (Sembilan) kursi.



Gambar 5.1. Peta Wilayah Kota Surakarta

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/id/8/87/Peta_Solo.jp

g

PEMILIHAN WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2020

1. Gambaran Umum

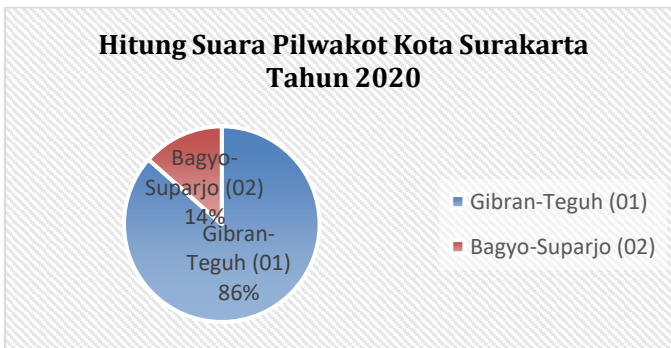
Kota Surakarta merupakan wilayah otonom dengan status kota di Provinsi Jawa Tengah, dengan letak secara geografis berada antara $110^{\circ}45'15''$ - $110^{\circ}45'35''$ BT dan $7^{\circ}36'00''$ - $7^{\circ}56'00''$ LS dengan luas wilayah $44,04 \text{ km}^2$. Secara administrasi wilayah Kota Surakarta memiliki batas utara dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali, batas selatan dengan Kabupaten Sukoharjo, batas timur dengan Kabupaten Karanganyar, dan batas barat dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali.

Pemilihan Umum Wali Kota Surakarta 2020 dilaksanakan pada 9 Desember 2020 untuk memilih Wali Kota Surakarta periode 2021-2026. Pilwakot Surakarta tahun 2020 diikuti dua pasang calon, yaitu Gibran Rakabuming Raka berpasangan dengan Teguh Prakoso yang keduanya merupakan kader PDIP. Partai pendukung pasangan ini adalah PAN, Golkar, Gerindra, PSI, PPP, Nasdem, Demokrat, PKB, Hanura, Perindo, PBB, PKPI, dan Gelora. Lawan dari pasangan ini berasal dari calon perseorangan yaitu Bagyo Wahyono yang berpasangan dengan Suparjo Fransiskus Xaverius.



Gambar 5.2. Pasangan Calon Walikota Surakarta Tahun 2020
Sumber : <https://kota-surakarta.kpu.go.id/galeri-foto/>

Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara KPU Kota Surakarta diperoleh hasil sebagai berikut. Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakoso, Presentase suara 86,5% dengan total suara 255.336. Bagyo Wahyono-Suparjo Fransiskus Xaverius, Presentase suara 13,5% dengan total suara 35.127.



Gambar 5.5. Hitung Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Surakarta Tahun 2020
Sumber: <https://pilkada2020.kpu.go.id/#/pkwkk/tungsur/3372>

Tabel 5.1. berikut ini menjelaskan perolehan suara Pilwakt tahun 2020 di 5 (lima) kecamatan di Surakarta untuk kedua pasangan calon.

Tabel 5.1. Hitung Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Surakarta Tahun 2020 per Kecamatan

Wilayah	(01) Gibran Rakabuming Raka - Teguh Prakosa	(02) Bagyo Wahyono - Suparjo Fransiskus Xaverius
Laweyan	35.581	6.762
Serengan	20.564	3.241
Pasar Kliwon	31.793	5.259
Jebres	64.770	8.448
Banjarsari	72.628	11.417

Sumber: <https://pilkada2020.kpu.go.id/#/pkwkk/tungsur/3372>

Pilwakot Surakarta tahun 2020 pada akhirnya dimenangkan oleh Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakoso dengan presentase suara mencapai 86,5% dari total suara 255.336. Pasangan ini menang mutlak di 5 (lima) kecamatan, yaitu Kecamatan Laweyan, Serengan, Pasar Kliwon, Jebres, dan Banjarsari. Pencalonan Gibran dalam Pilwakot tahun 2020 menarik untuk diteliti, selain persoalan merebaknya persepsi adanya dinasti politik yang sedang dibangun oleh keluarga Jokowi, juga terkait dengan Kota Solo atau Surakarta yang pada masa lalu menjadi salah satu dari dua kerajaan besar di Jawa, Kasunanan Surakarta dan Pura Mangkunegaran, yang mewariskan takhta secara turun-temurun. Sebelumnya berdasarkan tradisi politik dinasti kuno, pemegang garis keturunan dua raja sempat berkeinginan terjun ke dunia politik. Sejak masa penjaringan bakal calon, Partai Gerakan Indonesia Raya sempat memininang Pangeran Mangkunegaran, Gusti Pangeran Haryo Paundrakarna Jiwo Suryonegoro sebagai calon wakil wali kota. Terdapat juga Bendoro Raden Ajeng Putri Woelan Sari Dewi, cucu Raja Kasunanan Surakarta, Pakubuwono XII. Dalam perjalannya PDIP lebih memilih mengusung Teguh Prakosa.

Merujuk pada pernyataan di atas, maka dinasti politik merupakan fenomena melanggengkan kekuasaan monarki atau turun temurun. Tidak dapat dipungkiri, bahwa banyak keluarga dinasti politik yang berhasil menguasai rotasi kekuasaan di daerah,

tidak hanya dalam lingkup eksekutif atau pemilihan kepala daerah, melainkan juga legislatif di daerah. Dalam praktiknya sebagian besar kandidat yang berasal dari dinasti politik tersebut memperoleh kemenangan. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Buehler (2013) yang menyebutkan, bahwa banyak keluarga dinasti politik yang berusaha memperluas basis mereka untuk bergabung dengan legislatif dengan tujuan mendominasi pos-pos pemerintah eksekutif. Fenomena di atas dikuatkan dengan adanya pragmatism yang berkembang di partai politik yang enggan mengajukan calon dalam pemilihan kepala daerah, sehingga keputusan tersebut semakin memperkuatnya langgengnya dinasti politik di daerah, sebagaimana yang terjadi pada Pilwakot Surakarta tahun 2020.

Model Baru *Blusukan* Ala Gibran-Teguh pada Pemilihan Walikota Surakarta Tahun 2020

Adopsi strategi *blusukan* yang digunakan oleh pasangan Gibran-Teguh menarik untuk dianalisis lebih lanjut. Selain inovasi strategi *blusukan* yang digunakan pada Pilkada yang relatif baru, juga dikaitkan dengan konsep familisme dan dinasti politik yang menjadi sorotan berbagai pihak atas kemenangan pasangan ini. Inovasi *blusukan* yang dimaksud adalah kampanye bertatap muka lewat layar yang dibawa oleh relawan pasangan Gibran-Teguh menuju kampung atau wilayah-wilayah di sekitar Surakarta untuk bertemu langsung dengan konstituennya. Metode ini merupakan bentuk model kampanye baru dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang dimodifikasi dengan model *blusukan* sebagai strategi lama yang dipopulerkan oleh Jokowi yang merupakan ayah dari Gibran Rakabuming Raka.

Berbeda dengan *blusukan* sebelumnya, *blusukan* yang dilakukan adalah *blusukan* digital dengan memanfaatkan *virtual box* sebagai sarana kampanye online. *Virtual box* yang dimaksud berupa layar monitor berukuran 49 inci dilengkapi kamera jenis *circuit TV* menggunakan jaringan internet dan mikrofon. *Virtual box* ini dibawa berkeliling oleh tim sukses ke rumah-rumah penduduk untuk menyapa dan melakukan interaksi dengan warga. Dalam kesempatan tersebut, warga dapat menyampaikan

keluhannya secara langsung, tanpa menciptakan kerumunan sebagaimana slogan Gibran “*Pemilune slamet, wargane iso ngeliwet*”, artinya Pemilunya selamat, warganya bisa makan”. Dengan demikian melalui *virtual box* tersebut interaksi dapat terjadi secara dua arah.

Pemanfaatan media *virtual box* ini dilatarbelakangi pemikiran, bahwa pemilihan Walikota Surakarta yang berlangsung tanggal 9 Desember 2020 dilaksanakan di tengah-tengah pandemi wabah Covid-19. Sesuai ketentuan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pilkada tahun 2020 menetapkan aturan kampanye rapat umum yang disesuaikan dengan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Rapat umum merupakan salah satu metode kampanye yang biasanya disebut juga sebagai kampanye akbar. Ketentuan mengenai kampanye akbar tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19 yang terbit pada 7 Juli 2020. Sebagaimana bunyi Pasal 64 PKPU 6/2020, partai politik/ pasangan calon/ tim kampanye yang hendak menggelar kampanye akbar harus dilakukan melalui media daring untuk menghindari penularan Covid-19. Fenomena ini menjadi alasan *blusukan* digital sebagai sarana kampanye yang diterapkan pasangan calon Gibran-Teguh.

Pemanfaatan media yang lekat dengan generasi Alpha (2011 sampai dengan sekarang) menjadikan bentuk komunikasi yang dilaksanakan oleh tim sukses pasangan ini lebih efektif dibandingkan dengan pasangan Bajo yang menggunakan media komunikasi politik melalui satu ponsel. Keunggulan media kampanye ini tidak terlepas dari sumber daya politik yang dimiliki pasangan Gibran-Teguh. Sebagaimana diketahui Bagyo Wahyono adalah tukang jahit, dan Suparjo sebagai karyawan lembaga pelatihan kerja. Keduanya adalah pengurus Yayasan Surya Nuswantara. Berasal dari *wong cilik*, Bajo menganut nilai politik “dari, oleh dan untuk rakyat.” Berawal dari modal nol rupiah saat awal kampanye, kekurangan biaya logistik yang diperoleh dari iuran dan loyalitas kader organisasi sosial budaya ini.

Komunikasi yang dilakukan pasangan Gibran-Teguh juga meliputi non verbal, yaitu dengan menggunakan atribut-atribut

Jawa yang memegang tradisi atau *nguri-nguri* budaya Jawa. Gibran berpenampilan *Njawani* dengan memakai baju lurik khas Jawa, menggunakan bahasa Jawa dalam menyapa warga, dan mohon doa restu dengan tanda *sungkem* kepada masyarakat yang dikunjungi. Bagi masyarakat Jawa, hal ini diapresiasi sebagai sikap *nguwongke* atau bentuk rasa menghargai *wong cilik*. Sikap ini juga dapat dipahami sebagai sikap pemimpin yang mengayomi rakyatnya.

Terlepas inovasi *blusukan* yang dilakukan pasangan ini, kemenangan Gibran sebagai calon walikota Surakarta erat dikaitkan dengan dinasti politik dan *familisme*, mengingat usia dan pengalaman yang masih awam terkait politik. Kemenangan ini juga ditopang popularitas dan sumber daya yang ia miliki sebagai anak Presiden RI. Fenomena di atas sesuai dengan pendapat Park (2004), bahwa lahirnya dinasti politik disebabkan oleh salah satu model *familisme* yaitu dinasti politik yang didasarkan secara murni pada hubungan darah langsung dalam keluarga (*consanguinity*). Kemenangan Gibran merupakan bukti, bahwa dinasti politik yang didasarkan pada hubungan darah langsung dalam keluarga (*consanguinity*) masih menjadi pertimbangan utama masyarakat dalam memilih sosok Gibran sebagai walikota.

Aksi enam partai politik yang mengusung pasangan calon Gibran-Teguh membuktikan sebagai salah satu faktor kuatnya dinasti politik yang dalam pandangan Haris dipandang sebagai akses dari otonomi daerah yang menjadikan demokrasi terbajak (*hijacked democracy*) oleh sirkulasi hubungan inti genealogis berdasarkan relasi kekeluargaan. Kemenangan Gibran pada Pilwakot Surakarta dan Bobby Afif Nasution menantu Jokowi di Kota Medan dapat disebut sebagai tonggak dimulainya dinasti politik Jokowi sebagai bentuk politik keluarga (*political clan*). Pandangan masyarakat pemilih yang sebagian besar tidak mempersoalkan politik dinasti ini juga menunjukkan, warisan feodalisme yang masih berpengaruh kuat di masyarakat tradisional, tidak hanya terbatas pada sumber kekuasaan ekonomi, melainkan membentuk jejaring loyalitas dalam masyarakat. Sehingga tidak mengherankan jika pada akhirnya akan melahirkan

yang oleh Migdal (1988) disebut sebagai *local strongmen* maupun Sidel (2005) *local bossism* yang terjadi karena adanya kolusi bisnis-politik di tingkat lokal.

Aksi partai politik memanfaatkan popularitas dan elektabilitas kandidat yang berafiliasi dengan dinasti politik juga semakin menguatkan pendapat Mosca, bahwa setiap kelas menampilkan kecenderungan untuk berlangsung turun-temurun, bahkan ketika posisi politik terbuka luas kedudukan keluarga penguasa akan tetap mendapatkan berbagai keuntungan (Dal Bó et al., 2009). Pada akhirnya dinasti politik menghilangkan kesempatan berkompetisi, karena siapapun yang maju sangat sulit untuk menang, dengan asumsi dinasti politik telah mempunyai jaringan yang lebih luas dan dukungan yang lebih banyak sehingga memiliki peluang lebih besar untuk menang dengan menghilangkan nilai meritokrasi dan alternatif pilihan.

Saat ini *blusukan* telah mengalami pergeseran makna yaitu bentuk kampanye dan alat sosialisasi kepada masyarakat. *Blusukan* lebih cenderung menjadi bagian politik pencitraan, agar terkesan peduli dengan masalah yang ada di masyarakat, mendengarkan keluhan dan membantu menyelesaikan masalah, bahkan selayaknya kampanye, pada kesempatan tersebut kandidat memberikan janji-janji kepada masyarakat agar bersedia mendukungnya. Dengan demikian, *blusukan* sebagai kekuatan politik tidak hanya sekedar pertemuan antara calon politik dengan masyarakat, tetapi juga mengandung muatan politik sebagai strategi untuk memenangkan pemilihan kepala daerah.

Kajian Familisme dan Dinasti Politik dalam Pemilihan Walikota Surakarta Tahun 2020

Kemenangan pasangan Gibran-Teguh pada Pilwakot Surakarta menarik untuk dikaji dengan konsep familisme dan dinasti politik. Hal ini didasarkan pada asumsi, adanya kontribusi yang signifikan atas terpilihnya Gibran-Teguh dalam Pilwakot Surakarta tahun 2020 ini dengan dua konsep di atas. Peneliti tidak mengukur berapa pengaruh kedua variabel tersebut atas kemenangan pasangan ini, namun hanya mengaitkan dengan pendekatan kualitatif berdasarkan wawancara

dan studi dokumen yang dilaksanakan di lapangan.

Majunya kerabat petahana dan pejabat politik dalam kontestasi Pilkada tahun 2020, setidaknya membuktikan upaya mempertahankan kekuasaan dalam domain keluarga. Dinasti politik sebagai bentuk kolektif dari patronase elit dalam wujud kolektif yang didasarkan pada hubungan keluarga, etnisitas, maupun hubungan darah lainnya yang intinya memunculkan monarki dalam demokrasi di aras lokal (Sisca, 2020). Jika saja hanya Gibran Rakabuming Raka yang maju, mungkin masih terlalu awal untuk disimpulkan sebagai dinasti politik, namun ketika Bobby juga pada akhirnya diusung oleh partai politik dan memenangi kontestasi Pilkada, maka persepsi masyarakat semakin menguat, bahwa telah terjadi ketergantungan yang besar terhadap ikatan keluarga yang kemudian melahirkan kebiasaan untuk menempatkan keluarga atau yang memiliki ikatan kekerabatan dalam meraih jabatan politik. Hal ini tidak berlebihan mengingat telah ada tiga orang dalam keluarga yang memegang jabatan politik, meskipun oleh Hess dikatakan belum sepenuhnya tepat, karena belum mencapai 4 orang sebagaimana pada Dinasti ratu Atut dan Yasin Limpo.

Merujuk pada pendapat (Djati, 2013) yang menjelaskan terdapat empat tipologi rezim dinasti politik di Indonesia, maka dapat disimpulkan, bahwa dinasti politik yang dibangun pada Pilwakot Surakarta adalah familisme yang berbasis *feudalisme dynasties* atau kuasa *gono-gini*, yaitu dinasti politik yang dibangun berdasarkan patrimonialisme, figurisasi, elitisme dan *aji mumpung*. Dalam konteks dinasti politik dan familisme yang terjadi pada Pilwakot Surakarta, memang masih jauh jika dibandingkan dengan tipologi familisme dari dinasti politik yang ada di Banten.

Selanjutnya meskipun konsep familisme dan dinasti politik merupakan dua hal yang saling berkaitan yaitu berdasarkan hubungan darah dari keluarga dan hubungan perkawinan, namun belum dapat dikategorikan dalam dinasti politik menurut Gaezon (2002) yang membedakan dinasti politik berdasarkan dua model yaitu model arisan, dimana satu daerah dipimpin oleh satu keluarga secara terus menerus dan model *cross-chamber* atau

silang, yaitu kekuasaan bercabang dan dibagi menjadi posisi-posisi strategis di suatu daerah (Riyansah, 2021).

Berpijak dari fenomena *familisme* yang terjadi pada Pilwakot Surakarta tahun 2020 dapat dipahami sebagai *new social order*, yakni dorongan psikologis bagi seseorang untuk dapat berkarir di dalam dua ranah yakni publik sebagai birokrat dan privat sebagai korporat-swasta. Sebelum berkiprah di politik, Gibran adalah seorang pengusaha catering yang diberi nama Chilli Pari. Berdasarkan pengalaman dan usia, meskipun masih relatif muda, peluang untuk terjun ke dunia politik sangat terbuka, karena sebagai anak Jokowi yang sebelumnya merupakan walikota Surakarta dan saat ini menjabat sebagai presiden RI. Hubungan darah diantara keduanya dapat digunakan untuk menjelaskan ketertarikannya untuk terjun ke dunia politik. Selanjutnya majunya Bobby Afif Nasution menantu Jokowi berkontestasi di Kota Medan dapat dianalisis menggunakan model kedua, yaitu *quasi-familisme*. Model ini didasarkan pada sikap afeksi dan solidaritas dari anggota keluarga dalam struktur kekuasaan. Artinya, dimensi dinasti politik ini tidak lagi berada dalam ranah keluarga inti saja, tetapi juga telah bercabang dengan keluarga lainnya yang tidak satu keturunan darah, dalam hal ini melalui jalur perkawinan (Hee Park, 2004). Dengan demikian model dinasti politik yang terjadi pada pemilihan walikota Surakarta dan Medan tahun 2020 dengan mengusung anak serta menantu Jokowi dapat dianalisis dengan 2 (dua) model yaitu model *familisme* dan *quasi familisme*.

Embrio Dinasti Jokowi lahir pada Pilkada tahun 2020 dengan munculnya nama Gibran dan Bobby pada kontestasi kepala daerah. Dengan demikian, dilihat dari suksesi dinasti politik, maka dapat digolongkan sebagai *by accident*. Kategori *by design* belum dapat digunakan untuk dinasti ini, karena jejaring familisme dalam pemerintahan belum lama terbentuk, belum memiliki relasi yang kuat, dan belum lama didesain untuk menempati jabatan tersebut. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka dinasti politik Jokowi dikategorikan sebagai *by accident*, yaitu suksesi pemerintahan yang dilakukan secara tiba-tiba dengan mencalonkan kerabat menjelang dilaksanakan Pilkada tahun 2020 (Djati, 2013).

Berdasarkan simpulan di atas, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menganalisis ada tidaknya efek merugikan dari keberlangsungan dinasti yang meliputi sosio-ekonomi dan politik, seperti klientisme, kemiskinan tinggi, pertumbuhan ekonomi rendah, kinerja parlemen yang buruk, hingga sumber daya manusia yang rendah, khususnya terkait dinasti politik Jokowi sebagai dinasti baru di Indonesia (Ahmad, 2019).

SIMPULAN

Inovasi *blusukan* digital pasangan Gibran-Teguh dengan menggunakan media *virtual box* berhasil memenangi Pilwakot Surakarta tahun 2020. *Blusukan* menjadi strategi kampanye yang saat ini masih ditunggu oleh masyarakat untuk dapat berinteraksi dengan pasangan calon selain kekuatan *familisme* atau dinasti politik sebagai pertimbangan utama pemilih tradisional. Dinasti politik pada Pilwakot Surakarta terbentuk dari model familisme yang berbasis *feudalisme dynasties* atau kuasa gono-gini, yaitu dinasti politik yang dibangun berdasarkan patrimonialisme, figurisasi, elitisme dan *aji mumpung*. Fenomena familisme di atas dapat dipahami sebagai *new social order*, yakni dorongan psikologis bagi seseorang untuk dapat berkarir di dalam dua ranah yakni publik sebagai birokrat dan privat sebagai korporat-swasta. Selain familisme, majunya Bobby Afif Nasution menantu Jokowi berkontestasi di Kota Medan menjadi contoh penerapan model kedua, yaitu *quasi-familisme* yaitu dimensi dinasti politik ini tidak lagi berada dalam ranah keluarga inti saja, tetapi juga telah bercabang dengan keluarga lainnya yang tidak satu keturunan darah atau melalui jalur perkawinan. Dengan demikian model dinasti politik yang terjadi pada pemilihan walikota Surakarta dan Medan tahun 2020 dengan mengusung anak serta menantu Jokowi dapat dianalisis dengan 2 (dua) model yaitu model *familisme* dan *quasi familisme*. Model dinasti politik Jokowi dapat dikategorikan sebagai *by accident* bukan *by design*. Rekomendasi peneliti, bahwa tradisi *blusukan* tidak semata-mata sebagai metode kampanye menjelang pemilihan umum, melainkan perlu dikembalikan ke makna hakiki dalam rangka mengetahui kondisi riil masyarakat.

Selain itu perlu upaya pembenahan proses rekrutmen di tubuh partai politik untuk menanggulangi meluasnya politik dinasti dan dinasti politik pada perhelatan pemilihan umum di masa yang akan datang.

Daftar Pustaka

- Ahmad, N. (2019). *Political Dynasties and Political Competition in Pakistan*
- Asako, Y., Iida, T., Matsubayashi, T., & Ueda, M., 2015. Dynastic politicians: Theory and evidence from Japan. *Japanese Journal of Political Science*, 16(1), pp.5–32.
- Aspinall, E., & Uhaib, M., 2016. *Understanding Family Politics: Successes and Failures of Political Dynasties in Regional Indonesia*. pp. 1–16.
- Bó, E.D., Cattaneo, M., Tella, R., Di-Foster, A., Galor, O., Hallak, J. C., Knight, B., Levine, D., Mas, A., Moretti, E., Olken, B., Roland, G., & Shepsle, K., 2007. Dal Bó, Dal Bó y Snyder. Political Dynasties. *The Review of Economic Studies*, 76(1), pp.115–142.
- D.A.C.I., 2020. Media Asing Soroti Dinasti Politik Keluarga Jokowi di Pilkada. *Cnn*.
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20201204144401-134-578031/media-asing-soroti-dinasti-politik-keluarga-jokowi-di-pilkada>
- D.A.C.I., 2021. Dadang-Sahrul Gunawan Ditetapkan Pemenang Pilkada Bandung. *Cnn Indonesia*.
- Djati, W.R., 2013. *Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi: Dinasti Politik di Aras Lokal*. 18, pp. 203–231.
- Hee-Park, T., 2004. The Influences of Familism on Interpersonal Trust of Korean Public Officials. *International Review of Public Administration*, 9(1), pp.121–135.
- Kreuzer, P., 2005. *Political Clans and Violence in the Southern Philippines*. 71, pp.46.
- Kurtz, D.M., 1989. The Political Family: A Contemporary View. *Sociological Perspectives*, 32(3), pp.331–352.
- Moleong, L.J., 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi rev). PT. Remaja Rosdakarya.

Riyansah, A., 2021. *Dynasty Control of the Process of Forming a Coalition of Political Parties in the 2020 Cilegon Local Leaders Election*. 3(3), pp.244–257.

Sisca, S.P., 2020. No Title. *Kompas.Com*, 9 December 2020. <https://www.kompas.com/global/read/2020/12/09/214234870/pilkada-2020-di-mata-media-asing-dinasti-politik-jokowi-jadi-sorotan>

Studi, P., Administrasi, I., Administrasi, F.I., Madura, U., 2015. *(PILKADES) Serentak Di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015* pp.25–34.

Surbakti, R., 2015. Transformasi Bawaslu Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu. In *Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Indonesia*.

<https://kota-surakarta.kpu.go.id/2020/12/18/rapat-pleno-rekapitulasi-penghitungan-suara-tingkat-kota-surakarta-dalam-pilwalkot-surakarta-tahun-2020/>

<https://www.kompas.com/global/read/2020/12/09/214234870/pilkada-2020-di-mata-media-asing-dinasti-politik-jokowi-jadi-sorotan?page=all#page2>

<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20201204144401-134-578031/media-asing-soroti-dinasti-politik-keluarga-jokowi-di-pilkada>